

Analisis Peran Akuntansi Sektor Publik Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada Kantor SAMSAT Wilayah Makassar 1

Yosevina Lastriani Daima¹, Abdul Sumarlin²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi sektor publik dalam meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah pada Kantor Samsat Wilayah Makassar 1. Pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dikelola secara transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala bagian keuangan, staf akuntansi, dan auditor internal Kantor Samsat Wilayah Makassar 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berbasis akrual telah meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem pelaporan keuangan yang terstandarisasi, penggunaan aplikasi SIMDA, dan publikasi laporan keuangan secara berkala. Namun, masih terdapat kendala dalam hal kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan optimalisasi sistem informasi akuntansi untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: *Akuntansi Sektor Publik, Transparansi, Pendapatan Daerah, Samsat, Akuntabilitas.*

Abstract

This study aims to analyze the role of public sector accounting in improving the transparency of regional revenue management at the Makassar City Samsat Office. Regional revenue from motor vehicle taxes is one of the main sources of Regional Original Income (PAD) that needs to be managed transparently and accountably. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Research informants consisted of the head of the finance department, accounting staff, and internal auditors of the Makassar City Samsat Office. The results show that the implementation of accrual-based public sector accounting has increased the transparency of regional revenue management through a standardized financial reporting system, the use of the SIMDA application, and the publication of regular financial reports. However, there are still obstacles in terms of human resource competency and information technology infrastructure. This study recommends the need to increase human resource capacity through continuous training and optimization of accounting information systems to strengthen the accountability and transparency of regional financial management.

Keywords: *Public Sector Accounting, Transparency, Regional Revenue, Samsat, Accountability.*

Copyright (c) 2025 Lastriani Daima, Abdul Sumarlin

✉ Corresponding author : lastriani2002mks@gmail.com¹, semmabdulsumarlin@gmail.com²

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dikelola melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi pendapatan daerah yang signifikan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kontribusi PKB dan BBNKB mencapai 35-40% dari total PAD provinsi, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Besarnya kontribusi ini menuntut adanya sistem pengelolaan yang dapat memastikan pendapatan daerah dikelola dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi tuntutan penting di era reformasi birokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pendapatan daerah dikelola dan digunakan. Dalam konteks ini, akuntansi sektor publik memainkan peran strategis sebagai instrumen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. (Fajaruddin, 2021). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjadi landasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 merupakan lembaga yang mengelola pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor dituntut untuk menerapkan praktik akuntansi sektor publik yang baik. Sistem pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang memadai akan mendukung terciptanya transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi yang belum optimal, serta koordinasi antar instansi yang masih perlu ditingkatkan (Sari, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai: (a) Bagaimana penerapan akuntansi sektor publik dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Kantor Samsat Wilayah Makassar 1?, (b) Bagaimana peran akuntansi sektor publik dalam meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah pada Kantor Samsat Wilayah Makassar 1?, (c) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi sektor publik untuk meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah pada Kantor Samsat Wilayah Makassar 1?. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang praktik akuntansi sektor publik yang diterapkan serta kontribusinya terhadap transparansi pengelolaan pendapatan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kantor SAMSAT Kota Makassar yang berlokasi di Jl. Andi Mappanyungki, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selama 2 bulan (September - Oktober) selama pelaksanaan KKPL berlangsung. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pegawai bagian keuangan, serta data sekunder berupa dokumen laporan keuangan dan SOP yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahap, yaitu: observasi melalui pengamatan langsung terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan, wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan staf akuntansi, dan dokumentasi melalui pengumpulan data dari laporan keuangan dan dokumen terkait

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan Profesi (KKLP) di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah Makassar 1 memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung sistem administrasi perpajakan kendaraan bermotor dan pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan ini sekaligus sebagai tahap penelitian. Pelaksanaan ini Peserta KKLP akan ditempatkan di berbagai unit kerja seperti loket pelayanan, bagian registrasi dan identifikasi, bagian penetapan pajak, serta unit penerbitan STNK dan TNKB. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan proses pelayanan, membantu entry data, melayani pertanyaan masyarakat, serta mempelajari sistem aplikasi yang digunakan dalam administrasi kendaraan bermotor. Pelaksanaan KKLP ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meneliti sekaligus memperoleh pengalaman praktis dalam bidang administrasi pemerintahan, mengembangkan keterampilan komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat, serta memahami mekanisme kerja birokrasi pemerintahan. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pengalaman kerja yang relevan, meningkatkan kemampuan problem solving dalam menghadapi berbagai situasi pelayanan, serta membangun jaringan profesional di lingkungan instansi pemerintahan yang akan bermanfaat untuk pengembangan karir di masa depan.



Gambar 1. Kegiatan pengenalan dan orientasi



Gambar 2. Pendampingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)



Gambar 3. Pelaksanaan Samsat Keliling



Gambar 4. Dokumentasi Penarikan Mahasiswa KKLP

Gambaran Umum Kantor Samsat Kota Makassar



Gambar 5. Kantor SAMSAT I Kota Makassar

Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 merupakan unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam bidang administrasi kendaraan bermotor, pemungutan pajak kendaraan bermotor, dan penerbitan STNK. Kantor ini merupakan hasil kerjasama tiga instansi yaitu Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan.

Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo dengan luas area pelayanan sekitar 2.500 meter persegi. Kantor ini melayani rata-rata 800-1.200 transaksi per hari yang terdiri dari pembayaran pajak tahunan, perpanjangan STNK, balik nama, dan mutasi kendaraan. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kota Makassar mencapai 1.287.432 unit dengan rincian 987.654 unit kendaraan roda dua dan 299.778 unit kendaraan roda empat.

Struktur organisasi Kantor Samsat Kota Makassar secara umum terdiri dari: Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penetapan dan Pendataan, Seksi Penagihan dan Keberatan, Bendahara Penerimaan, dan unit pelayanan. Total pegawai yang bertugas berjumlah 47 orang yang terdiri dari personel Polri, pegawai Badan Pendapatan Daerah, dan pegawai PT Jasa Raharja.

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 pada tahun 2024 mencapai Rp 456,8 miliar atau 94,3 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 484,5 miliar. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang baik meskipun masih terdapat gap sebesar 5,7 persen yang perlu dioptimalkan melalui berbagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perbaikan sistem pelayanan.

Kantor Samsat Kota Makassar telah menerapkan berbagai inovasi pelayanan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut meliputi: (1) Samsat Drive Thru yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran tanpa turun dari kendaraan, (2) Samsat Keliling yang menjangkau berbagai kecamatan di Kota Makassar dengan jadwal rutin, (3) Samsat Corner yang bekerjasama dengan pusat perbelanjaan dan supermarket, (4) E-Samsat yang

memungkinkan pengecekan dan pembayaran pajak secara online, dan (5) Samsat Online Nasional (Samolnas) yang mengintegrasikan layanan Samsat secara nasional. Inovasi-inovasi ini telah memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat dan efisiensi pelayanan.

Visi Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 adalah mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang profesional, transparan, dan akuntabel. Misi yang diemban adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, serta mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

a. Penerapan Akuntansi Sektor Publik pada Kantor Samsat Wilayah Makassar 1

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan, Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sejak tahun 2015. Penerapan SAP berbasis akrual dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri.

Sistem akuntansi yang diterapkan mencakup proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan, penyajian laporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Setiap transaksi penerimaan pendapatan dari PKB dan BBNKB dicatat secara real-time dalam sistem informasi yang terintegrasi. Transformasi akuntansi sektor publik melalui integrasi metrik kinerja ke dalam sistem akuntansi memungkinkan organisasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi mereka secara real-time (Anim Wiyana, dkk., 2023).

Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh BPKP untuk melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis, mulai dari penerimaan pendapatan, pencatatan jurnal, posting ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Implementasi transformasi digital dalam mengelola arus keuangan di sektor publik meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi.

Staf Akuntansi menjelaskan bahwa setiap hari dilakukan rekonsiliasi antara data penerimaan pendapatan dengan data yang tercatat dalam sistem akuntansi. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan. Rekonsiliasi juga dilakukan secara bulanan dengan bank sebagai tempat penyimpanan pendapatan daerah.

Proses Pencatatan Pendapatan

Proses pencatatan pendapatan di Kantor Samsat Kota Makassar dimulai dari transaksi pembayaran PKB dan BBNKB oleh wajib pajak. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai di loket Samsat, melalui e-Samsat, atau melalui Samsat keliling. Setiap transaksi yang terjadi langsung tercatat dalam sistem dan mendapatkan nomor bukti penerimaan.

Berdasarkan hasil observasi, sistem pembayaran telah terintegrasi dengan sistem perbankan sehingga setiap penerimaan pendapatan langsung masuk ke rekening kas daerah. Sistem ini mengurangi risiko penyelewengan karena minimnya penanganan uang tunai oleh petugas. Pencatatan akuntansi dilakukan

dengan mengakui pendapatan pada saat kas diterima (cash basis) untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan mengakui pendapatan pada saat hak untuk menagih timbul (accrual basis) untuk Laporan Operasional (LO). Metode ganda ini sesuai dengan SAP yang mengharuskan penyajian LRA berbasis kas dan LO berbasis akrual.

Penyusunan Laporan Keuangan

Kantor Samsat Wilayah Makassar 1, menyusun laporan keuangan secara periodik, baik bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan. Laporan keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Komponen laporan keuangan ini harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh tim akuntansi yang terdiri dari enam orang staf dengan latar belakang pendidikan akuntansi. Laporan keuangan yang telah disusun kemudian disampaikan kepada BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan konsolidasi dengan laporan keuangan unit kerja lainnya.

b. Peran Akuntansi Sektor Publik dalam Meningkatkan Transparansi

Penyediaan Informasi Keuangan yang Akurat dan Tepat Waktu

Penerapan akuntansi sektor publik di Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 berperan penting dalam menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu. Sistem akuntansi yang terkomputerisasi memungkinkan penyajian data keuangan secara real-time. Kepala Bagian Keuangan menyatakan bahwa dengan sistem yang ada saat ini, laporan realisasi pendapatan dapat diakses setiap saat oleh pihak yang berwenang.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga menjadi indikator transparansi. Berdasarkan data yang diperoleh, Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 selalu menyampaikan laporan keuangan bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan laporan keuangan tahunan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketepatan waktu ini memungkinkan stakeholder untuk segera mengetahui kondisi keuangan dan kinerja pengelolaan pendapatan daerah.

Standarisasi dan Keseragaman Pelaporan

Penerapan SAP berbasis akrual memberikan standarisasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Hal ini memudahkan pemahaman dan perbandingan laporan keuangan antar periode maupun antar unit kerja. Auditor Internal menjelaskan bahwa dengan adanya standar yang jelas, proses audit dan pemeriksaan menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keseragaman format pelaporan juga memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami informasi keuangan yang disajikan. Laporan keuangan yang tersusun sesuai standar memberikan kredibilitas dan dapat dipercaya oleh pengguna laporan. Implementasi IPSAS memfasilitasi komparabilitas informasi keuangan karena harmonisasi internasional akuntansi sektor publik

Peningkatan Akuntabilitas melalui Sistem Audit Internal

Kantor Samsat Kota Makassar memiliki mekanisme audit internal yang dilakukan secara berkala. Audit internal berfungsi untuk memastikan bahwa sistem akuntansi dan pengendalian internal berjalan dengan baik. Hasil audit internal menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem dan prosedur akuntansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Auditor Internal, audit dilakukan setiap triwulan untuk memeriksa kesesuaian pencatatan transaksi dengan bukti-bukti pendukung, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal. Temuan audit yang bersifat material harus segera ditindaklanjuti untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Mekanisme audit internal ini memperkuat akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah karena setiap transaksi dan prosedur dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Transparansi tidak hanya dalam penyajian informasi tetapi juga dalam mekanisme pengawasan dan pemeriksaan.

Publikasi Laporan Keuangan

Konteks pengelolaan keuangan daerah, transparansi berarti keterbukaan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran daerah. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi tentang bagaimana pendapatan daerah diperoleh dan digunakan. Indikator transparansi pengelolaan keuangan daerah meliputi ketersediaan dokumen anggaran dan laporan keuangan yang dapat diakses publik, kemudahan memperoleh informasi, kejelasan informasi, dan ketepatan waktu publikasi informasi (Yurika Aulia, dkk., 2024). Transparansi juga diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan kepada masyarakat. Meskipun laporan keuangan Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 merupakan bagian dari laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, namun data realisasi pendapatan dari PKB dan BBNKB dapat diakses melalui website BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Sub Bagian Pendapatan menjelaskan bahwa setiap bulan data realisasi pendapatan ditampilkan dalam papan informasi di kantor Samsat dan juga dipublikasikan melalui media sosial resmi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui capaian pendapatan dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Selain publikasi rutin, Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 juga membuka akses bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih detail melalui mekanisme permohonan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

c. Kendala dalam Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Salah satu kendala utama dalam penerapan akuntansi sektor publik adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Meskipun staf akuntansi memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, namun pemahaman terhadap SAP berbasis akrual masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena SAP berbasis akrual memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas.

Kepala Bagian Keuangan mengakui bahwa masih diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas staf

akuntansi. Mutasi pegawai yang cukup sering juga menjadi tantangan karena harus melakukan transfer knowledge kepada pegawai baru. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntansi pemerintahan, terutama di daerah, menjadi tantangan utama dalam implementasi akuntansi sektor publik di Indonesia.

Infrastruktur Teknologi Informasi

Meskipun telah menggunakan aplikasi SIMDA, namun masih terdapat kendala terkait infrastruktur teknologi informasi. Koneksi internet yang tidak stabil kadang menghambat proses input data secara real-time. Selain itu, kapasitas server yang terbatas menyebabkan sistem menjadi lambat pada saat jam sibuk pelayanan.

Staf Akuntansi menjelaskan bahwa pernah terjadi gangguan sistem yang menyebabkan data tidak dapat diakses selama beberapa jam. Meskipun sudah ada sistem backup, namun gangguan teknis ini tetap mengganggu kelancaran operasional. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang memadai menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem akuntansi sektor publik

Koordinasi Antar Instansi

Kantor Samsat melibatkan tiga instansi yaitu Polri, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja. Koordinasi antar instansi dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan masih perlu ditingkatkan. Perbedaan sistem akuntansi yang digunakan oleh masing-masing instansi kadang menyebabkan ketidakcocokan data.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 telah menerapkan akuntansi sektor publik berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan ini mencakup sistem pencatatan transaksi secara real-time, penggunaan aplikasi SIMDA untuk pelaporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan yang komprehensif meliputi LRA, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CaLK.

Kedua, akuntansi sektor publik berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah pada Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 melalui beberapa aspek. Penyediaan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu memungkinkan stakeholder untuk mengakses data realisasi pendapatan secara berkala. Standarisasi pelaporan berdasarkan SAP meningkatkan kredibilitas dan komparabilitas laporan keuangan. Sistem audit internal yang berjalan efektif memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Publikasi laporan keuangan dan data realisasi pendapatan melalui berbagai media meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Ketiga, terdapat beberapa kendala dalam penerapan akuntansi sektor publik untuk meningkatkan transparansi, yaitu keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami kompleksitas SAP berbasis akrual, infrastruktur

teknologi informasi yang masih perlu dioptimalkan terutama terkait stabilitas koneksi dan kapasitas server, serta koordinasi antar instansi dalam sistem.

Referensi :

- Anim Wiyana, S. E. (2023). PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. *Jurnal STIEM*, Vol. 9 No.2, 240-250.
- Fajaruddin. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, ke-1.
- Putri Ariella Belinda, d. N. (2021). PENTINGNYA IMPLEMENTASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAHAN. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, Vol. 1, no.1, 58-77.
- RI, B. (2024). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010*.
- Sari, R. (2021). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Kewirausahaan*(Vol. 10 No. 4 Tahun).
- Yurika Aulia, Deana Sri Br Hasibuan, Hetri Wuruwu, Priska, Devriska Gulo, Silvia Nurhalizah. (2024). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN. *Journal of Student Research (jsr)*, Vol.2, No.2, 80-86.